

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan limbah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 definisi limbah merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Semakin banyak limbah yang ditimbulkan dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan yang menyebabkan lahan tempat pemrosesan akhir semakin berkurang. Akumulasi sampah akan berdampak pada lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan menyebabkan masalah kesehatan masyarakat. Dampak dari sampah pada lingkungan dan kesehatan menjadi masalah yang segera diatasi dan dilakukan pengelolaan agar terhindar dari dampak berbahaya dan berkelanjutan. Dampak limbah rumah tangga tersebut seperti adanya pencemaran air, timbul bau tidak sedap yang disebabkan penguraian limbah, dan potensi penyakit (Hasibuan, 2016).

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, peningkatan sampah setiap tahun dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi masyarakat, dan sistem pengelolaan sampah di tiap daerah (KNLH, 2008). Pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2018) sebesar 265.015,3 juta jiwa dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang jumlahnya sekitar 261.890,9 juta jiwa (BPS, 2017). Kondisi tersebut menimbulkan bertambahnya volume, jenis sampah yang beragam, serta karakteristik sampah dan limbah.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perindustrian dalam *Word Bank*, pada tahun 2019 jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 67 juta ton per tahun dengan capaian jumlah sampah organik sekitar 60% dan sampah plastik sekitar 15%. Pada tahun 2016-2017 di DKI Jakarta dalam sehari memproduksi sampah cukup tinggi. Pulau Jawa menjadi wilayah tertinggi yang menghasilkan sampah dengan rincian sebagai berikut, Surabaya menghasilkan sampah sebesar 9.896,78 m/hari, Jakarta menghasilkan sampah sebanyak 7.164,5m/hari, sedangkan yang berada di luar pulau jawa, antara lain Makassar memproduksi sampah sebanyak 6.485,65 m/hari dan selanjutnya Denpasar menghasilkan sampah sebesar 3.657,20 m/hari, Manado menghasilkan sampah per hari sebesar 2.064,00 m/hari serta Medan menghasilkan sampah sebanyak 1.892,00 m/hari. Berdasarkan data Adipura (2017) jumlah timbunan sampah padat domestik di Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 17.489,17 ton/hari atau 6.386.832,05 ton/tahun dengan asumsi komposisi sampah organik sebesar 56,29% dan sampah plastik 18,87%, sampah kertas 11,93%, sampah logam 2,61%, sampah kain 2,82%, sampah karet dan kulit 2,16%, sampah kaca 1,43%, dan sampah lain-lain 3,89% (DIPKLH Jawa Timur, 2017)

Seiring dengan laju pembangunan, pertumbuhan penduduk dan perkembangan Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun disertai pula dengan meningkatnya kegiatan masyarakat sehari-hari yang akan memberikan dampak bagi lingkungan sekitar seperti bertambahnya jumlah sampah di masyarakat yang akan menimbulkan banyak permasalahan dan pencemaran lingkungan sehingga diperlukan adanya pengelolaan sampah agar lingkungan

tetap nyaman dan bersih. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

Selain adanya pertumbuhan penduduk, terdapat faktor lain yaitu tingkat konsumsi masyarakat. Saat ini terjadi perubahan pola konsumsi yang dapat menyumbang peningkatan timbulan sampah. Perubahan pola konsumsi semakin terlihat nyata jika kita mengarah ke daerah perkotaan, banyak kegiatan sehari-hari misalnya, kebiasaan masyarakat yang membeli makanan siap saji yang menyisakan pembungkus atau wadah tempat makanan tersebut. Pola konsumsi seperti ini sangat berpengaruh besar pada peningkatan limbah (Sundarta *et al.*, 2018).

Faktor selanjutnya yaitu mengenai sistem pengelolaan sampah di tiap daerah. Secara umum pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan sampah di tempat sumber, tahap pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir sampah yang bisa dilakukan dengan berbagai metode pemusnahan sampah. Jenis penanganan sampah di Indonesia berdasarkan data tahun 2008 adalah sebagai berikut, pengurugan sebesar 68,86%, pengomposan sebesar 7,19%, *open burning* sebesar 4,79 %, sampah yang dibuang ke sungai sebesar 2,99 %, sampah yang ditangani dengan insenerator kecil sebesar 6,59 %, serta sampah yang ditangani non pengurugan sebesar 9,58 % (Damanhuri dan Padmi, 2010). Dari data tersebut, penanganan sampah yang paling tinggi dilakukan yaitu dengan cara pengurugan dengan tanah atau disebut dengan metode *landfiliing*.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari sumber hingga ke tempat pemrosesan akhir yang dilakukan secara sinergis oleh masyarakat, pemerintah, pihak swasta dan pengusaha serta diperlukan adanya perubahan paradigma dari paradigma lama menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang bertujuan mengurangi jumlah sampah yang dibuang, mengurangi pencemaran lingkungan, mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 sistem eksisting pengelolaan sampah terdiri atas 5 aspek yang pertama yaitu aspek teknis yang terdiri tingkat pelayanan sampah, timbulan sampah, komposisi dan karakteristik sampah, prasarana dan sarana, kondisi TPA. Kedua, aspek institusi yang terdiri bentuk organisasi pengelola sampah, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Ketiga, aspek pembiayaan yang terdiri biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan serta retribusi. Keempat, aspek peraturan yang terdiri jenis peraturan daerah, kelengkapan materi peraturan daerah dan penerapan peraturan daerah. Kelima, aspek peran masyarakat dan swasta yang terdiri tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat, program kampanye dan edukasi dan peran swasta. Kelima aspek tersebut memiliki hubungan dan kaitan erat agar dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Pengelolaan sampah dapat dikatakan optimal jika kelima aspek tersebut berjalan saling menunjang dan seimbang.

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 km² atau 12,10% dari luas total Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas 25 kecamatan dengan jumlah

penduduk menurut BPS Banyuwangi (2019) sebanyak 1.745.675 jiwa. Pelayanan sampah di Kabupaten Banyuwangi menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi yang ditangani oleh bagian bidang kebersihan dengan pendekatan akhir yaitu dengan melakukan pengumpulan sampah dari sumber dan diangkut ke TPS dan dibuang ke TPA. Pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar mencakup wilayah perkotaan, hal yang mendasari dikarenakan luas wilayah Kabupaten Banyuwangi didominasi wilayah perdesaan dengan model penanganan sampah yang dilakukan masyarakat secara *on-site*. Tercatat timbunan sampah Kabupaten Banyuwangi tahun 2017-2018 sebesar $\pm 3.566\text{m}^3/\text{hari}$ atau $\pm 1.177 \text{ ton/hari}$ (DLH Kabupaten Banyuwangi, 2019). Bidang Kebersihan sebagai bidang dari DLH Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mekanisme yang disebut suatu sistem yang meliputi input, proses, dan output. Input pelayanan pengelolaan sampah meliputi perencanaan pengelolaan sampah, sedangkan proses meliputi pelaksanaan pengelolaan sampah dan output meliputi hasil pengelolaan sampah. Jumlah timbulan sampah suatu daerah memiliki hubungan pemilihan peralatan misalnya wadah, alat pengumpulan dan pengangkutan, adanya fasilitas untuk daur ulang, luas dan jenis TPA. Dalam pelayanan sampah domestik, tentu saja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya pelayanan pengelolaan sampah seperti teknik operasional dan manajemen pengelolaan persampahan, serta pemeliharaan dan kelengkapan infrastruktur persampahan. Dalam hal tersebut merupakan bagian dari faktor faktor pendekatan sistem. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi pelayanan sampah domestik dengan pendekatan sistem

untuk mengoptimalkan aspek teknis dan aspek institusi kinerja pengelolaan limbah domestik Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Identifikasi Masalah

Pelayanan pengelolaan sampah domestik di wilayah Kabupaten Banyuwangi diselenggarakan oleh DLH Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan pelayanan sampah yang terjadi setiap daerah adalah kurang optimalnya pengelolaan sampah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur dengan timbulan sampah tahun 2019 sebesar 3387 m³ yang memiliki trend peningkatan timbulan sampah dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan berkurangnya kapasitas lahan TPA. Pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar mencakup wilayah perkotaan, hal yang mendasari cakupan pelayanan sampah terfokus wilayah perkotaan dikarenakan luas wilayah Kabupaten Banyuwangi serta didominasi wilayah perdesaan dengan model penanganan sampah yang dilakukan masyarakat secara *on-site*. Dalam perkembangan daerah di Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari permasalahan sampah. Data timbulan sampah Kabupaten Banyuwangi setiap tahun mengalami kenaikan. Data timbulan sampah Kabupaten Banyuwangi yang dihasilkan oleh penduduk tahun 2019 sebesar ± 3.387 m³/hari. Timbulan tersebut berasal dari pemukiman, pasar, taman, drainase, terminal, rumah sakit, dan pembilas jalan yang hanya sebagian dapat diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hal tersebut mendasari adanya studi pelayanan sampah domestik dengan melakukan analisis pengelolaan sampah dengan

pendekatan sistem terkait aspek teknik operasional dan aspek institusi pelayanan sampah di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Pembatasan

Pada penelitian ini peneliti memiliki batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu aspek teknis dan aspek institusi wilayah kerja pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi. Aspek teknis ditinjau dari sarana dan prasarana pelayanan sampah dengan melakukan analisis kebutuhan kendaraan operasional dan analisis umur pakai tempat pemrosesan akhir sampah sedangkan aspek institusi ditinjau dengan analisis sumber daya manusia dengan penyusunan strategi untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah. Aspek lain yang berhubungan dengan pelayanan pengelolaan sampah seperti aspek hukum, intansi, pembiayaan dan peran serta masyarakat tidak diteliti karena terdapat prioritas yang ditentukan serta keterbatasan dari penelitian

1.3.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana strategi aspek institusi dalam peningkatan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi?
2. Berapa kendaraan operasional yang diperlukan untuk pelayanan pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana umur pakai tempat pemrosesan akhir di TPA Tegalwero Kabupaten Banyuwangi?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian yaitu mengevaluasi pelayanan pengelolaan sampah domestik dengan pendekatan sistem di Kabupaten Banyuwangi

1.4.2 Tujuan khusus

1. Mempelajari gambaran umum wilayah pelayanan pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Banyuwangi
2. Mengidentifikasi aspek input (aspek institusi) pelayanan pengelolaan sampah domestik yang meliputi bentuk organisasi pengelola sampah, struktur organisasi, dan sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi
3. Mengidentifikasi aspek proses (aspek sistem pengelolaan operasional) sampah domestik yang meliputi pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah di Kabupaten Banyuwangi
4. Mengidentifikasi aspek output (aspek teknis operasional) pelayanan pengelolaan sampah domestik yang meliputi tingkat pelayanan sampah, timbulan sampah, komposisi dan karakteristik sampah, prasarana dan sarana, kondisi TPA di Kabupaten Banyuwangi
5. Mengidentifikasi pelayanan sampah melalui sumber daya manusia pelayanan pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Banyuwangi
6. Menganalisis aspek institusi dengan analisis SWOT terkait pelayanan pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Banyuwangi
7. Menganalisis timbulan sampah beberapa tahun kedepan di Kabupaten Banyuwangi

8. Menganalisis jumlah kebutuhan kendaraan operasional pelayanan pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Banyuwangi
9. Menganalisis umur pakai tempat pemrosesan akhir di Kabupaten Banyuwangi

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi peneliti

Bagi peneliti manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian yakni menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait pelayanan pengelolaan sampah domestik serta melatih pengembangan ilmu di bidang kesehatan lingkungan terkait analisis analisis pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Banyuwangi.

1.5.2 Bagi institusi terkait

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dalam evaluasi pelayanan pengelolaan sampah domestik sehingga dapat digunakan untuk masa mendatang.